

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan *website* dalam pelaksanaan *Electronic Government* di Pemerintah Kota Cirebon khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *Electronic Government* tersebut. Seluruh data yang didapat selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus dan kajian penelitian. Pada bab ini akan menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan *Electronic Government* di Kota Cirebon khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

4.1 Analisis Pengembangan Website www.cirebonkota.go.id dalam Pelaksanaan *Electronic Government* Di Pemerintah Kota Cirebon

Analisis pengembangan *website* dalam pelaksanaan *Electronic Government* adalah suatu cara untuk melihat sejauhmana pengembangan *website* dalam pelaksanaan *Electronic Government* di Pemerintah Kota Cirebon yang telah berjalan saat ini. Untuk mengetahui pengembangan *website* dalam pelaksanaan *Electronic Government* di Pemerintah Kota Cirebon, peneliti melihat dari tahapan strategi penerapan *Electronic Government* menurut Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *Electronic Government*. Adapun penerapan *Electronic Government* diukur dengan menggunakan 4 tahapan, yaitu tahap persiapan,

pematangan, pematapan dan pemanfaatan. Berikut ini akan dipaparkan lebih lengkap mengenai kondisi pengembangan *website* dalam pelaksanaan *Electronic Government* di Kota Cirebon:

4.1.1 Tahap Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal dalam menerapkan *electronic government* di suatu daerah. Persiapan awal untuk mendukung penerapan *electronic government* yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Yang pertama adalah penyediaan pegawai dalam mengelola *e-government* khususnya *website* pemerintah Kota Cirebon. Pegawai harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar pelaksanaan *electronic government* dapat dilaksanakan dengan lancar. Merangkum hasil wawancara dari informan, mengenai penyediaan pegawai tentunya yang memiliki keahlian atau kemampuan di bidang IT, jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dasar dalam bidang teknologi informasi ada 10 orang. Jumlah pegawai tersebut dirasa kurang mengingat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik merupakan dinas yang mengelola *e-government* di pemerintah Kota Cirebon. Kompetensi pegawai sebagai pengelola *e-government* dipertajam dengan dilakukannya pelatihan. Hal tersebut menunjukkan persiapan yang dilakukan sudah cukup baik.

b. Kesiapan Situs Informasi

Merangkum hasil wawancara dari informan, dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Cirebon sudah memiliki situs informasi, yaitu website resmi pemerintah Kota Cirebon beralamatkan www.cirebonkota.go.id yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Yang memiliki kegunaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon. Selain itu hampir seluruh OPD yang ada di Kota Cirebon juga sudah memiliki situs website walaupun belum seluruhnya aktif.

Tabel 4.1
Alamat Website Lembaga

No.	Instansi	Alamat Website
1.	Kota Cirebon	www.cirebonkota.go.id
2.	DKIS Kota Cirebon	dkis.cirebonkota.go.id
3.	BK Diklat Kota Cirebon	bkdiklat.cirebonkota.go.id
4.	Disporbudpar Kota Cirebon	disporbudpar.cirebonkota.go.id
5.	Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon	ketahananpangan.cirebonkota.go.id
6.	Bagian Hukum Kota Cirebon	hukum.cirebonkota.go.id
7.	Dinas Pendidikan Kota Cirebon	disdik.cirebonkota.go.id
8.	BPMPPKB Kota Cirebon	bpmppkb.cirebonkota.go.id
9.	Komisi Informasi Kota Cirebon	komisiinformasi.cirebonkota.go.id
10.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	keckesambi.cirebonkota.go.id
11.	BPMPT Kota Cirebon	bpmpt.cirebonkota.go.id
12.	Sekretariat Dewan Kota Cirebon	dprd.cirebonkota.go.id
13.	DPUPESDM Kota Cirebon	dpupesdm.cirebonkota.go.id
14.	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	www.rsudgunungjati.cirebonkota.go.id
15.	Disdukcapil Kota Cirebon	disdukcapil.cirebonkota.go.id
18.	Bappeda Kota Cirebon	bappeda.cirebonkota.go.id

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Cirebon telah memiliki situs informasi, salah satunya yaitu *website* resmi pemerintah Kota Cirebon yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat.

4.1.2 Tahap Pematangan

Pematangan penerapan *electronic government* merupakan tahap kedua dari penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahap ini dapat dilihat sejauh mana pemerintah Kota Cirebon menerapkan *electronic government* dalam mengembangkan *website* yang interaktif dan terhubung dengan OPD lain yang ada di Kota Cirebon.

a. Situs Informasi Publik Interaktif

Situs informasi publik interaktif dalam hal ini, yaitu situs yang dapat memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dan sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Merangkum hasil wawancara dari informan, pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon memiliki media sosial seperti Instagram dan Twitter serta kolom 'Surat Warga' yang tersedia di website resmi pemerintah Kota Cirebon. Akun Instagram pemerintah Kota Cirebon dibuat mulai bulan September tahun 2016 yang sampai saat ini memiliki pengikut sebanyak 2.979 dan 768 postingan. Akun Twitter pemerintah Kota Cirebon dibuat mulai bulan November tahun 2016 yang sampai saat ini memiliki pengikut sebanyak 522 dan 1.184 postingan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Cirebon dalam berinteraksi dengan publik memanfaatkan website resmi dan juga media sosial seperti Instagram dan Twitter.

b. Situs Antar Muka Keterhubungan dengan Lembaga Lain

Situs antar muka keterhubungan dengan lembaga lain merupakan salah satu unsur pendukung dalam penerapan *electronic government*. Penerapan *electronic government* di Kota Cirebon dapat dilihat melalui adanya tautan atau *link* yang terdapat di situs website resmi pemerintah Kota Cirebon. Dalam website pemerintah Kota Cirebon terdapat tautan yang sudah terhubung dengan website lembaga lain namun dalam bentuk GPR atau *Government Public Relation* yang menautkan website pemerintah Kota Cirebon dengan website Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, website pemerintah Kota Cirebon juga menyediakan tautan yang terhubung dengan OPD yang ada di Kota Cirebon.

Jadi dapat dikatakan bahwa situs antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain telah diadakan oleh pemerintahan Kota Cirebon berupa tautan-tautan yang menghubungkan situs website resmi pemerintah Kota Cirebon dengan lembaga lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan konten *subdomain* yang terhubung dengan organisasi-organisasi perangkat daerah di lingkungan Kota Cirebon.

4.1.3 Tahap Pemantapan

a. Situs Transaksi Pelayanan Publik

Situs transaksi pelayanan publik dalam hal ini situs yang menyediakan fasilitas transaksi secara elektronik antara pemerintah dan masyarakat

dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan dan agar lebih efisien.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam situs resmi pemerintah Kota Cirebon yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik belum terdapat transaksi dalam pelayanan publik, karena *website* pemerintah Kota Cirebon sendiri sifatnya sebagai portal. Artinya apabila masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, masyarakat harus menuju *link subdomain* yang berupa lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tersebut yang terdapat di *website* resmi pemerintah Kota Cirebon.

Dapat disimpulkan bahwa *website* Pemerintah Kota Cirebon yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon belum memiliki transaksi pelayanan publik karena *website* tersebut sifatnya sebagai portal. Namun apabila diluar *website* resmi, pemerintah Kota Cirebon sudah memiliki situs transaksi pelayanan publik yaitu perijinan *online* tetapi masih semi elektronik.

b. Interoperabilitas Aplikasi Maupun Data Dengan Lembaga Lain

Interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain, yaitu kemampuan aplikasi maupun data yang digunakan untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan lembaga lain sehingga terdapat adanya pertukaran informasi atau data.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik belum memiliki interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain, namun hal ini menjadi tujuan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Cirebon itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *electronic government*, pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon belum memiliki aplikasi yang digunakan bersama dengan lembaga lain, namun hal tersebut menjadi tujuan pemerintah Kota Cirebon yang ingin segera dicapai.

4.1.4 Tahap Pemanfaatan

Tahap pemanfaatan adalah tahap tertinggi dalam penerapan *electronic government* menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Pada tahap ini pemerintah diharapkan mampu untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dalam bentuk aplikasi untuk pelayanan G2G (Government to Government), G2C (Government to Citizen) dan G2B (Government to Business) yang terintegrasi.

Dalam pelaksanaan *electronic government*, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon belum memiliki aplikasi pelayanan yang terintegrasi baik dengan bisnis maupun masyarakat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cirebon.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan penerapan *electronic government* belum maksimal. Pemerintah belum memiliki aplikasi yang terintegrasi dengan baik dengan instansi lain, swasta ataupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan *electronic government* dalam penyelenggaraan *website* resmi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan *website* www.cirebonkota.go.id dalam pelaksanaan *electronic government* di pemerintah Kota Cirebon dinilai berdasarkan Tahapan Penerapan *Electronic Government* menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 saat ini belum mencapai tahap pematangan, di mana pemerintah harus sudah membuat situs transaksi pelayanan publik dan situs antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain dalam *website* resminya. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik juga sudah mulai memasuki tahap ketiga yaitu tersedianya fasilitas transaksi elektronik seperti perijinan *online* namun masih semielektronik, di mana hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cirebon belum mengembangkan *website* resmi pemerintah Kota Cirebon yang beralamatkan www.cirebonkota.go.id ini secara maksimal.

4.2 Faktor yang Mendorong dan Menghambat Pengembangan Website *www.cirebonkota.go.id* dalam Pelaksanaan *Electronic Government* di Pemerintah Kota Cirebon

Dibawah ini dijelaskan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam mengembangkan *website* resmi pemerintah Kota Cirebon yang beralamatkan *www.cirebonkota.go.id*.

4.2.1 Faktor yang Mendorong Pengembangan Website *www.cirebonkota.go.id* dalam Pelaksanaan *Electronic Government* di Pemerintah Kota Cirebon

Dalam pengembangan *website* terkait dengan pelaksanaan *electronic government* terdapat faktor yang mendorong keberhasilan hal tersebut, yaitu:

a. *Support*

Support merupakan elemen pertama dan paling penting yang harus dimiliki dalam penerapan *electronic government* oleh pemerintah. *Support* adalah adanya keinginan yang dimiliki pemerintah untuk dengan sungguh-sungguh menerapkan *electronic government*, bukan hanya omongan semata atau mengikuti tren saja. Dukungan yang dimaksud adalah dalam bentuk sebagai berikut:

1. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini menyangkut sejauh mana keinginan pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan dukungannya terkait

penerapan *electronic government* di lingkungan pemerintah Kota Cirebon. Dukungan pemerintah disini yaitu dalam bentuk *political will* dalam menerapkan *electronic government* yang dapat dilihat salah satunya yaitu dibangunnya superstruktur terkait *electronic government* seperti adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang jelas agar tercipta lingkungan yang kondusif. Tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam menerapkan *e-government* merangkum dari hasil wawancara adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau regulasi sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Penerapan *electronic government* di Kota Cirebon dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses

penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian pemerintah daerah Kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon sehingga terbentuk Bidang Layanan *E-Government* sebagai bidang baru pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bertanggungjawab dalam pengelolaan informasi di lingkungan pemerintah Kota Cirebon. Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik mulai beroperasi sejak awal tahun 2017.

Dalam penerapan *electronic government* sudah pasti melibatkan produk hukum dari pusat sampai dengan level pemerintah Kota Cirebon sebagai dasar untuk mengawali pembangunan *electronic government* di Kota Cirebon. Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang tersusun dengan baik, tentunya penerapan *electronic government* dapat memiliki dasar yang kuat. Dasar hukum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cirebon saat ini dapat dikatakan masih belum kuat dikarenakan belum adanya peraturan daerah maupun peraturan walikota yang khusus mengatur tentang pengelolaan *electronic government* dalam menunjang pemerintahan yang berbasis elektronik.

Dukungan pemerintah dalam bentuk superstruktur menunjukkan bukti kesungguhan pemerintah dalam penerapan *electronic government*, namun belum sepenuhnya diperlihatkan oleh pemerintah Kota Cirebon. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan walikota ataupun peraturan daerah

yang mengatur secara rinci terkait penerapan *electronic government* di Kota Cirebon.

2. Sosialisasi

Salah satu unsur yang harus dilakukan untuk mendukung penerapan *electronic government* di suatu daerah adalah mensosialisasikan konsep *electronic government* secara merata, kontinyu dan menyeluruh baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat sehingga baik pemerintah maupun masyarakat mengetahui adanya penerapan *electronic government*.

Pemerintah Kota Cirebon sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan *electronic government* baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Sosialisasi di kalangan birokrat atau pemerintahan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di berbagai kesempatan. Kepala Dinas selalu menyampaikan tentang penerapan *electronic government* yang dilakukan di Kota Cirebon di setiap *event* atau acara yang melibatkan aparat-aparat pemerintahan.

Pemerintah Kota Cirebon juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan *electronic government* melalui *website* resmi Kota Cirebon itu sendiri, media massa serta media sosial seperti Instagram dan Twitter. Adanya sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Kota Cirebon dapat mengetahui adanya penerapan *electronic government* yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud agar pelayanan serta

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat lebih mudah, efektif dan efisien. Sosialisasi juga dilakukan melalui perantara seperti melalui kelompok informasi masyarakat yang ada di Kota Cirebon dan relawan TIK untuk menyampaikan informasi terbaru terkait *electronic government*, hal tersebut dilakukan tidak secara rutin, namun dilakukan beberapa kali dalam setahun. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon masih kurang, belum terdapat sosialisasi secara langsung yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat. Dalam penerapan *electronic government* ini pemerintah Kota Cirebon telah menunjukkan dukungannya melalui dilakukannya sosialisasi baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat namun masih kurang masif.

b. Capacity

Capacity adalah salah satu elemen dalam mewujudkan keberhasilan *Electronic Government* yaitu berupa unsur kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat. Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan *capacity* ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Finansial

Ketersediaan sumber daya finansial untuk menerapkan konsep *electronic government* merupakan salah satu hal yang penting untuk mencapai keberhasilan penerapannya di suatu daerah. Tanpa adanya sumber daya finansial yang cukup, mustahil keberhasilan penerapan *electronic government* dapat terwujud. Sumber daya finansial berguna untuk

menunjang tersedianya sumber daya lainnya yaitu sumber daya manusia seperti halnya pelatihan pegawai, pembangunan infrastruktur ataupun penambahan dan pemeliharaan infrastruktur dan lain sebagainya. Terlebih untuk sumber daya finansial dalam infrastruktur dalam penerapan *electronic government* dibutuhkan biaya yang cukup besar. Sumber daya finansial dalam penerapan *electronic government* di Kota Cirebon berasal dari APBD Kota Cirebon.

Merangkum hasil wawancara dari informan, dapat diketahui bahwa anggaran dana untuk penerapan *electronic government* di Kota Cirebon setiap tahunnya fluktuatif atau tidak selalu sama. Rata-rata setiap tahunnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mendapatkan dana sekitar 2,5 Miliar rupiah sampai dengan 3 Miliar rupiah untuk penerapan *electronic government* dari total anggaran sekitar 10 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran dana penerapan *electronic government* setiap tahunnya sekitar 25% sampai dengan 30% dari alokasi anggaran keseluruhan yang diterima oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Untuk alokasi anggaran dalam hal infrastruktur tahun ini sekitar 1,4 Miliar rupiah. Anggaran tersebut termasuk dengan biaya langganan internet, dimana untuk biaya langganan internet dibutuhkan dana hampir 500 juta rupiah. Sebagian besar anggaran dana untuk infrastruktur tersebut digunakan untuk biaya internet, pemeliharaan jaringan wireless, pemeliharaan tower, pemeliharaan server, pengadaan perangkat pendukung jaringan dan lain sebagainya. Anggaran dana penerapan *electronic government* untuk tahun ini mengalami

peningkatan dikarenakan oleh adanya pembangunan *command center*. Namun, untuk alokasi dana untuk infrastruktur sendiri mengalami penurunan.

Anggaran dana dalam pengadaan infrastruktur penunjang *electronic government* di Kota Cirebon ini sudah cukup meskipun masih banyak hal yang harus dipenuhi untuk terciptanya pemerintahan berbasis elektronik yang optimal.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan ketersediaan pegawai dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan penerapan *electronic government* pada suatu daerah. Kompetensi pegawai yang dibutuhkan dalam penerapan *electronic government* di Kota Cirebon tentunya yang memiliki kompetensi di bidang IT atau TIK.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon masih kekurangan pegawai yang ahli di bidang IT. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik hanya memiliki satu orang programmer, yaitu Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi itu sendiri. Jumlah staf lainnya yang memiliki latarbelakang pendidikan di bidang IT hanya sekitar 10 orang pegawai. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di Kota Cirebon mengatasi hal tersebut dengan merekrut pegawai Non-PNS sebanyak 6 orang. Tentunya jumlah tersebut masih sangat kurang untuk OPD yang memiliki

tanggungjawab dalam hal pengelolaan *electronic government* di tingkat kota.

Selain dengan merekrut pegawai Non-PNS, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon juga mengadakan *transfer of knowledge*, pelatihan bagi para pegawai, yaitu dengan mengikuti seminar ataupun diklat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang IT. Pelatihan dilakukan tidak berkala, dalam setahunnya pelatihan dapat dilakukan satu kali ataupun empat kali.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam mendukung penerapan *electronic government* memiliki 13 orang pegawai di Bidang Layanan *E-Government* dengan 6 orang pegawai Non-PNS hasil rekrutmen dan 11 orang pegawai di Bidang TIK, jadi secara keseluruhan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon memiliki 24 orang pegawai yang membantu menerapkan *electronic government* di Kota Cirebon.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsur penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *electronic government*. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang mendukung, maka penerapan *electronic government* tidak mungkin terwujud. Merangkum hasil wawancara dari para informan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah membangun infrastruktur dan telah menyiapkan sarana

prasarana untuk menunjang penerapan *electronic government*. Berikut adalah sarana prasarana pendukung di Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, yaitu terdiri dari:

Tabel 4.2

Sarana Prasarana Bidang Layanan *E-Government*

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1	Meja ½ Biro	1	B
2	Kursi Putar	1	B
4	Meja Komputer	6	B
5	Komputer	6	B
6	Kursi Lipat	10	B
8	Printer	3	B

Sumber: Data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon

Kemudian berikut adalah infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon:

Tabel 4.3

Infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Cirebon

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Tower Triangle	60	60		
2	Rack Server Racmount 40 U	3	3		
3	Rack Wallmount 12 U	2	2		
4	UPS	3	3		
5	Net Protecktor	1	1		
6	Router Rb 1100 AH	10	6		4
7	Router Dinara	3	0		3
8	Switch Manageable	6	3		3
9	CRS 1036	5	5		
10	CCR 226	1	1		
11	CCR 212	2	1		1
12	CCR 106	12	12		
13	Router Haplite	20	20		
14	Router wireless Outdoor RB433	108	72		36
15	Router wireless Outdoor RB800	12	8		4
16	MiniPCI	186	149		37
17	Jumper Ntape Male	168	142		26
18	Antena Omni 2.4 Ghz	8	6		2
19	Antena Omni 5 Ghz	3	3		
20	Antena Grid 2.4 Ghz	176	122		54
21	Antena Grid 5 Ghz	36	34		2
22	Braket Antena	223	180	43	

Sumber: Data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon

Kondisi infrastruktur pemerintah Kota Cirebon di atas dapat dikatakan cukup memadai walaupun masih terdapat beberapa kerusakan. Infrastruktur jaringan dalam penerapan *electronic government* di Kota Cirebon telah sampai di tingkat kelurahan. Teknologi jaringan yang digunakan sebagian besar masih berupa *wireless*, belum semua *fiber optic* di

mana yang menggunakan *fiber optic* hanya di Kantor Komplek Bima. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon juga saat ini sedang membangun *command center* yang tentunya hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung penerapan *electronic government*. *Command center* adalah ruang kendali darurat yang bertujuan untuk mengatasi semua permasalahan yang terjadi dengan cepat dan dapat dijadikan kajian untuk evaluasi dari perangkat daerah yang terkait.

Dalam hal pengembangan infrastruktur, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon mempunyai rencana kedepan, yaitu mengembangkan kualitas pelayanan termasuk sarana prasarana. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik akan bekerjasama dengan penyedia layanan komunikasi dalam hal aksesibilitas internet di mana pemerintah berencana untuk menambah jaringan *fiber optic* yang dapat meningkatkan nilai keberhasilan penerapan *electronic government* di Kota Cirebon.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah membangun infrastruktur dan telah mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan *electronic government*. Namun dalam hal infrastruktur jaringan dapat dikatakan masih kurang menunjang dalam penerapan *electronic government* dikarenakan sebagian besar masih menggunakan wireless yang rentan terhadap gangguan. Untuk itu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon berencana ingin melakukan kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengembangkan jaringan infrastruktur

dengan menambahkan teknologi *fiber optic* sehingga jaringan komunikasi lebih stabil.

4.2.2 Faktor yang Meghambat Pengembangan Website www.cirebonkota.go.id dalam Pelaksanaan *Electronic Government* di Pemerintah Kota Cirebon

a. Value

Value merupakan manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan *electronic government* baik bagi pemerintah Kota Cirebon maupun bagi masyarakat. Manfaat dengan diterapkannya *electronic government* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Manfaat yang diperoleh setelah diterapkannya *electronic government* di Kota Cirebon yang paling dirasakan oleh pemerintah Kota Cirebon antara lain adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung. Selain itu juga meningkatnya kedisiplinan pegawai sehingga memperbaiki kinerja pegawai dan organisasi di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, serta adanya keterbukan salah satunya yaitu dengan dipublikasikannya berita terbaru maupun laporan-laporan keuangan pemerintah sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah sebagai wujud transparansi dari pemerintah Kota Cirebon. Kemudian dengan adanya *electronic government* ini, dapat mengurangi biaya administrasi dikarenakan oleh pengurangan penggunaan

kertas atau *paperless*, mengurangi tenaga yang dikeluarkan dan waktu pelayanan serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Masyarakat dalam penerapan *electronic government* memiliki peran penting di mana masyarakat merupakan penerima pelayanan dan pemberi masukan atas kinerja OPD-OPD dalam melaksanakan tugasnya. Setelah diterapkannya *electronic government*, salah satunya, yaitu dengan adanya website resmi Pemerintah Kota Cirebon maka diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaatnya seperti mudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Kota Cirebon. Berbagai informasi yang berkaitan dengan Kota Cirebon ada di website resmi pemerintah Kota Cirebon seperti berita-berita terbaru tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon, informasi mengenai visi dan misi kota, tempat pariwisata di Kota Cirebon juga dapat menjadi wadah masyarakat untuk bertanya maupun memberikan kritik dan sarannya untuk pemerintah Kota Cirebon. Masyarakat dapat mendapatkan pelayanan dengan lebih mudah dan cepat dimana dalam website resmi terdapat banyak portal yang terhubung ke berbagai OPD yang terdapat di lingkungan Kota Cirebon.

Namun masih terdapat kekurangan dalam manfaat yang diperoleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih ada beberapa konten yang terdapat di *website* resmi tidak dapat diakses dan beberapa portal *website* OPD yang tidak aktif. Faktor lainnya, yaitu sosialisasi dari pemerintah yang kurang massif kepada masyarakat mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui penerapan

electronic government itu sendiri dan bahkan tidak mengetahui adanya website resmi Kota Cirebon yang beralamatkan www.cirebonkota.go.id, sehingga *website* itu sendiri belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tentunya menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan keberhasilan *electronic government* di Kota Cirebon.